

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG TUGAS
POKOK DAN FUNGSI BIDANG KELUARGA
BERENCANA DI DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BATU BARA**

TUGAS AKHIR

Oleh:

ERINA SYAFITRI SWASTI
2203100018

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA
MEDAN 2026**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **ERINA SYAFITRI SWASTI**
N P M : 2203100018
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Sabtu, 18 April 2026
W a k t u : Pukul 08.15 s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si** (.....)
PENGUJI II : **SYAFRUDDIN, S.Sos, MH** (.....)
PENGUJI III : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP** (.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP
NIDN: 0030017402



Assoc Prof. Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom
NIDN: 0111117804

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Lengkap : **ERINA SYAFITRI SWASTI**
N.P.M : 2203100018
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIDANG KELUARGA BERENCANA DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATU BARA**

Medan, 10 Agustus 2026

Dosen Pembimbing


Ananda Mahardika, S.Sos,MSP

NIDN : 0122118801

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi


Ananda Mahardika, S.Sos,MSP

NIDN : 0122118801

Dekan


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP

NIDN: 0030017462

PERNYATAAN

Bismilahirrohmaniirrohim

Dengan ini saya, **ERINA SYAFITRI SWASTI**, NPM 2203100018, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 10 April 2026

Yang menyatakan,



ERINA SYAFITRI SWASTI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan tugas pokok dan fungsi Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara sesuai Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 22 Tahun 2023 Pasal 3. Fokus penelitian mencakup empat indikator utama, yaitu pelaksana kebijakan, sumber daya kebijakan, struktur dan mekanisme organisasi, serta lingkungan kebijakan. Penelitian dilatarbelakangi oleh masih adanya kesenjangan antara ketentuan kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan, terutama terkait koordinasi pelaksana, keterjangkauan pelayanan, dan partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap narasumber yang dipilih secara *purposive*. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan, yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh pelaksana, sumber daya, struktur organisasi, dan lingkungan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan cukup baik. Aparatur pelaksana memahami tugas sesuai pembagian kerja organisasi dan menjalankan program berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sarana pelayanan dasar serta alat kontrasepsi tersedia, meskipun fasilitas operasional masih terbatas pada kondisi tertentu. Koordinasi antarbidang, puskesmas, dan pemerintah desa berlangsung rutin melalui pelaporan berbasis aplikasi New SIGA. Dukungan pemerintah desa, kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama turut memperkuat penerimaan masyarakat terhadap program keluarga berencana. Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh koordinasi pelaksana, kecukupan sumber daya, kejelasan mekanisme organisasi, dan dukungan lingkungan sosial.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Keluarga Berencana, Pelayanan Publik.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya hingga akhir zaman semoga kita mendapat syafaatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP) dalam Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Syukur alhamdulillah dengan rahmat dan ridho-Nya disertai dengan usaha-usaha dan kemampuan yang ada, Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIDANG KELUARGA BERENCANA DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATU BARA”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasihat dari berbagai pihak selama penulisan skripsi ini. Oleh karna itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terutama dan yang paling utama kepada Allah SWT. Kedua orang tua tercinta, Ibunda Erlinda Simatupang dan Ayahanda Swatman. Meski hidup memisahkan jalan kalian, kasih sayang dan dukungan kalian tak pernah hilang itulah yang menopang penulis di saat ragu dan yang menguatkan di saat lelah. Saudara Kandung penulis Elisa Ramadhani Swasti serta keluarga besar

yang penulis banggakan. Gelar ini adalah bukti dari cinta kalian dan Gelar ini kupersembahkan untuk kalian semoga segala lelah dan air mata menjadi kebanggaan hangat di hati kita, serta keyakinan kalian akan masa depanku selalu aku hargai dan dedikasikan.

Pada kesempatan kali ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Assoc. Prof. Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus sebagai dosen pembimbing penulis yang selalu meluangkan waktu, mendukung, serta memberikan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.

6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf pegawai Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelajaran dan informasi selama masa perkuliahan.
8. Kepada teman-teman seperjuangan yang telah banyak berperan, terutama kepada teman-teman stambuk 2022 dan kelas 7B Ilmu Administrasi Publik konsentrasi Kebijakan atas semua kebaikannya, semoga Allah swt membalas kebaikan kalian.
9. Terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Opung Doli dan Opung Boru tercinta. Dalam setiap langkah penulis, doa, kasih sayang, serta perhatian yang tulus selalu menyertai, menjadikan kekuatan besar bagi penulis untuk terus bertahan. Tanpa kehadiran dan pengorbanan Opung, penulis mungkin tidak akan mampu menyelesaikan perjalanan ini dengan baik. Gelar ini adalah bukti dari cinta kalian juga dan Gelar ini kupersembahkan untuk kalian.
10. Untuk NPM 71220712020 penulis mengucapkan terimakasih atas penerimaanmu yang tak pernah menghakimi, meski kau tahu perjalanan hidup penulis tidak selalu mudah. Terimakasih telah percaya kepada kemampuan penulis, memberi dukungan nyata, doa dan waktu, meski banyak kekurangan yang melekat.

11. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat seperjuangan, Adinda Shakila dan Adinda Syahrani, yang telah hadir dan bertahan sejak masa TK hingga bangku perkuliahan. Dalam perjalanan panjang ini, kita tidak hanya berbagi tawa, tetapi juga pernah melalui perbedaan, kesalahpahaman, bahkan saling menjauh, hingga akhirnya kembali saling memahami dan menguatkan. Terima kasih atas setiap moment yang telah dilalui bersama, atas kesabaran, keikhlasan, dan kebersamaan yang tetap terjaga hingga hari ini. Semoga persahabatan ini terus bertahan, tumbuh semakin kuat, dan menjadi bagian indah dalam setiap langkah ke depan.

12. Terimakasih kepada sahabat tercinta seperjuangan semasa dibangku Kuliah ini Reina Nurhasanah dan Yofa Rasika Pane yang juga sama-sama berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini terimakasih telah memberikan dukungan, semangat serta kebersamaannya selama penulisan skripsi ini. dan sahabat-sahabat lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu di sini.

Ilmu yang diperoleh dengan kesungguhan akan menjadi dasar yang kuat dalam menapaki masa depan serta memberi manfaat bagi kehidupan. Penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Semoga Skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan Ilmu maupun pembaca. Dengan demikian, penulisan ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan dan referensi bagi pembaca. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan dimasa yang akan datang

penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang membantu.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Medan, 7 April 2026

Penulis

ERINA SYAFITRI SWASTI
NPM 2203100018

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.5 Manfaat Penelitian	4
1.6 Sistematika Penulisan	5
BAB II URAIAN TEORITIS	7
2.1 Implementasi	7
2.1.1 Pemahaman Tugas dan Fungsi	9
2.1.2 Inisiatif Pelaksanaan Program	9
2.1.3 Konsistensi Kehadiran dan Keterlibatan	10
2.1.4 Sikap dan Komitmen	10
2.1.5 Kerja Sama dan Koordinasi	11
2.2 Implementasi Menurut Para Ahli	11
2.3. Jenis-Jenis Implementasi Kebijakan	13
2.4. Lingkungan Kebijakan	17
2.5. Unsur-Unsur Kebijakan Publik	17
BAB III METODE PENELITIAN	21
3.1 Jenis Penelitian	21

3.2 Kerangka Konseptual	21
3.3 Definisi Konsep	23
3.4 Kategorisasi Penelitian	25
3.5 Narasumber Penelitian.....	25
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.7 Teknik Analisis Data.....	27
3.8 Waktu Dan Lokasi Penelitian	27
3.9 Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara.....	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	29
4.1 Sejarah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara.....	29
4.2 Deskripsi Narasumber	29
4.3 Deskripsi Wawancara	30
4.4 Hasil Penelitian.....	30
4.4.1 Pelaksana Kebijakan.....	31
4.4.2 Sumber Daya.....	33
4.4.3 Struktur dan Mekanisme Organisasi.....	35
4.4.4 Lingkungan Kebijakan.....	37
4.5 PEMBAHASAN.....	38
4.5.1 Pelaksana Kebijakan.....	39
4.5.2 Sumber Daya.....	41
4.5.3 Struktur dan Mekanisme Organisasi.....	42
4.5.4 Pembahasan Lingkungan Kebijakan.....	43
BAB V PENUTUP	46

5.1 Simpulan.....	46
5.2 Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kerangka Konsep.....	22
Gambar 3. 2 Bagan Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dinamika kependudukan merupakan persoalan strategis dalam pembangunan daerah karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan kesehatan. Di Kabupaten Batu Bara, persoalan ini masih menjadi tantangan, ditandai dengan meningkatnya jumlah pasangan usia subur, variasi partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana, serta ketimpangan akses pelayanan kesehatan reproduksi antar wilayah.

Kebijakan mengenai tugas pokok dan fungsi bidang keluarga berencana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara bertujuan menjamin terlaksananya perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi program keluarga berencana secara efektif. Melalui pelaksanaan tugas tersebut diharapkan program keluarga berencana dapat berjalan optimal, berkelanjutan, serta menjangkau masyarakat secara merata hingga tingkat desa. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan dan kondisi di lapangan. Rendahnya partisipasi sebagian masyarakat, keterbatasan jangkauan pelayanan, serta belum optimalnya keberlanjutan peserta keluarga berencana menunjukkan bahwa persoalan keluarga berencana tidak hanya

berkaitan dengan aspek teknis kesehatan, tetapi juga dengan tata kelola pemerintahan dan efektivitas implementasi kebijakan publik.

Bidang Keluarga Berencana sebagai organisasi perangkat daerah memiliki peran strategis dalam pengendalian penduduk. Dalam praktiknya, pelaksanaan tugas dan fungsi sering dipengaruhi oleh pola kerja yang telah terbentuk, sehingga pemahaman aparatur terhadap ketentuan normatif belum sepenuhnya diterapkan secara seragam. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan dalam implementasi kebijakan meskipun telah didukung regulasi formal mengenai tugas dan fungsi organisasi.

Pelaksanaan program keluarga berencana di tingkat desa sangat bergantung pada peran puskesmas dan pemerintah desa sebagai ujung tombak pelayanan. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan di tingkat kabupaten, tetapi juga oleh efektivitas koordinasi lintas level pemerintahan. Selain itu, keterbatasan sumber daya organisasi, baik dari sisi sumber daya manusia, beban kerja, maupun dukungan administratif, turut memengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang keluarga berencana.

Dalam penyelenggaraan kebijakan publik, pemantauan dan evaluasi merupakan instrumen penting untuk menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program keluarga berencana cenderung lebih berfokus pada aspek pelaporan administratif, sementara evaluasi terhadap kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi belum dilakukan secara komprehensif. Kondisi ini menyebabkan umpan balik kebijakan yang

diperoleh belum sepenuhnya mampu menggambarkan permasalahan implementasi yang terjadi di tingkat organisasi maupun unit pelaksanaannya. Secara regulatif, pelaksanaan tugas dan fungsi bidang keluarga berencana telah diatur dalam peraturan Bupati Batu Bara nomor 22 tahun 2023 pasal 3. Namun, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, karena dipengaruhi oleh pemahaman aparatur, kapasitas organisasi, koordinasi lintas level, serta sistem pemantauan dan evaluasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat indikasi kesenjangan antara ketentuan regulatif dengan praktik pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang keluarga berencana di Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji implementasi kebijakan tersebut, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta implikasinya terhadap penyelenggaraan program keluarga berencana di Kabupaten Batu Bara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan tentang tugas pokok dan fungsi bidang Keluarga Berencana di Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi kebijakan mengenai tugas pokok dan fungsi Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 22 Tahun 2023 Pasal 3, dengan menelaah bagaimana proses

pelaksanaan kebijakan tersebut dijalankan oleh aparatur pelaksana di tingkat organisasi maupun di lapangan. Analisis dilakukan melalui pengkajian terhadap aspek pelaksana kebijakan, ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya, struktur serta mekanisme koordinasi organisasi, dan pengaruh lingkungan kebijakan dalam mendukung keberhasilan program keluarga berencana. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan, termasuk efektivitas koordinasi antarunit kerja, keterlibatan pemerintah desa, peran tenaga lapangan keluarga berencana, serta respons masyarakat terhadap program yang dilaksanakan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat efektivitas implementasi kebijakan serta kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana di Kabupaten Batu Bara.

1.5 Manfaat Penelitian

a). Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian administrasi publik/ilmu pemerintahan, khususnya terkait implementasi kebijakan publik di tingkat pemerintahan daerah. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam memahami pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b). Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pemerintah daerah kabupaten batu bara sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan terkait tugas pokok dan fungsi bidang Keluarga Berencana di Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara sebagai bahan evaluasi internal terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang Keluarga Berencana, khususnya dalam aspek koordinasi, pemantauan, dan evaluasi program keluarga berencana. Bagi aparatur pelaksana di tingkat desa, penelitian ini diharapkan menjadi bahan refleksi dalam meningkatkan pemahaman serta pelaksanaan kebijakan keluarga berencana secara lebih terkoordinasi dan berkelanjutan. Selanjutnya, bagi peneliti berikutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan pembanding dalam mengkaji implementasi kebijakan publik di bidang kependudukan dan keluarga berencana.

I.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai isi penelitian, yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan sebagai kerangka awal penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini membahas teori-teori yang relevan dengan penelitian, meliputi konsep administrasi publik, kebijakan publik, implementasi kebijakan, serta tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, narasumber penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta uji keabsahan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan (tingkat desa dan organisasi pelaksana) serta pembahasan hasil penelitian dengan mengaitkannya pada teori dan kerangka pemikiran yang telah disusun.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penelitian yang menjawab rumusan masalah serta saran yang bersifat akademis dan praktis sebagai rekomendasi perbaikan implementasi kebijakan.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Implementasi

Dalam kajian administrasi publik dan manajemen pemerintahan, implementasi dipandang sebagai tahap penting yang menentukan keberhasilan suatu rencana atau keputusan. Para ahli Indonesia memberikan penekanan yang beragam terhadap konsep implementasi, namun pada dasarnya sepakat bahwa implementasi berkaitan dengan proses pelaksanaan oleh aktor dan organisasi pelaksana. Implementasi dapat dipahami sebagai proses pelaksanaan suatu rencana atau keputusan ke dalam tindakan nyata yang dilakukan oleh organisasi pelaksana melalui pemanfaatan sumber daya, pembagian tugas yang jelas, serta koordinasi dan pengawasan yang berkelanjutan. Implementasi merupakan proses yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor organisasi, aktor pelaksana, serta lingkungan tempat pelaksanaan berlangsung. Dengan demikian, implementasi tidak hanya menekankan pada terlaksananya suatu kegiatan, tetapi juga pada bagaimana proses pelaksanaan tersebut dijalankan secara efektif agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Secara etimologis, istilah *implementasi* berasal dari bahasa Inggris *to implement* yang berarti melaksanakan, menerapkan, atau menjalankan sesuatu yang telah direncanakan atau ditetapkan sebelumnya. Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan suatu rencana, keputusan, atau kesepakatan. Dengan

demikian, secara etimologis implementasi mengandung makna sebagai suatu tindakan nyata untuk merealisasikan sesuatu yang bersifat konseptual ke dalam bentuk kegiatan atau perbuatan yang konkret. Pengertian etimologis tersebut menunjukkan bahwa implementasi tidak berhenti pada tahap perencanaan, melainkan menekankan pada proses pelaksanaan yang dilakukan secara sistematis agar tujuan yang telah ditetapkan dapat diwujudkan dalam praktik.

. Dalam konteks kebijakan publik, implementasi diartikan sebagai upaya menjalankan keputusan atau peraturan yang telah ditetapkan. Ansell, C., & Torfing, (2016) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya berarti pelaksanaan instruksi formal, tetapi juga mencakup proses interpretasi, penyesuaian, dan penerjemahan kebijakan ke dalam konteks lokal. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi bersifat dinamis dan tidak selalu identik dengan kepatuhan administratif semata. Secara konseptual, implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai jembatan antara norma kebijakan dan realitas sosial. Kebijakan yang bersifat umum dan abstrak harus diterjemahkan menjadi tindakan konkret melalui mekanisme administratif, prosedur kerja, dan interaksi langsung dengan masyarakat.

Dalam kajian administrasi publik, implementasi tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan kegiatan secara teknis, tetapi juga sebagai proses yang melibatkan pemahaman pelaksana, sikap, komitmen, serta pola interaksi antar aktor dalam organisasi. Oleh karena itu, untuk menganalisis implementasi secara komprehensif, diperlukan kategorisasi yang mampu menggambarkan berbagai dimensi pelaksanaan di tingkat organisasi dan pelaksana lapangan.

Berdasarkan konsep implementasi menurut para ahli implementasi dipengaruhi oleh faktor pemahaman aparatur terhadap tugas, inisiatif pelaksanaan, konsistensi pelaksanaan, sikap dan komitmen pelaksana, serta kerja sama dan koordinasi antar unit kerja. Atas dasar tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa kategorisasi implementasi yang dijelaskan sebagai berikut.

2.1.1 Pemahaman Tugas dan Fungsi

Pemahaman terhadap tugas dan fungsi merupakan prasyarat utama dalam pelaksanaan implementasi. Rianto Nugroho (2018) menekankan bahwa implementasi hanya dapat berjalan efektif apabila pelaksana memahami secara utuh peran dan tanggung jawabnya dalam organisasi. Pemahaman tugas dan fungsi akan memengaruhi cara aparatur menerjemahkan rencana atau keputusan ke dalam tindakan nyata. Dalam konteks organisasi pemerintahan, pemahaman aparatur terhadap tugas dan fungsi juga menentukan konsistensi dan kualitas pelaksanaan kegiatan. Ketidakjelasan atau perbedaan pemahaman berpotensi menimbulkan variasi pelaksanaan serta tumpang tindih kewenangan antar unit kerja.

2.1.2 Inisiatif Pelaksanaan Program

Inisiatif pelaksanaan program mencerminkan kemampuan dan kemauan pelaksana untuk bertindak aktif dalam menjalankan tugasnya, tidak hanya bersifat menunggu instruksi. Menurut Agustino (2017), implementasi tidak akan berjalan optimal apabila aparatur hanya berorientasi pada rutinitas administratif tanpa adanya inisiatif untuk menyesuaikan pelaksanaan dengan kondisi lapangan. Inisiatif pelaksana juga menunjukkan tingkat adaptasi organisasi terhadap dinamika

lingkungan. Aparatur yang memiliki inisiatif akan lebih responsif dalam mengatasi kendala dan mengembangkan strategi pelaksanaan agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai.

2.1.3 Konsistensi Kehadiran dan Keterlibatan

Konsistensi kehadiran dan keterlibatan aparatur dalam pelaksanaan kegiatan merupakan indikator penting dari keberlanjutan implementasi. Solichin Abdul Wahab (2016) menyatakan bahwa implementasi memerlukan keterlibatan pelaksana secara berkesinambungan, bukan hanya pada tahap awal kegiatan. Ketidakkonsistenan kehadiran dan keterlibatan aparatur dapat menghambat alur pelaksanaan serta melemahkan koordinasi antar aktor. Oleh karena itu, konsistensi menjadi elemen penting dalam menjaga kesinambungan proses implementasi di tingkat organisasi maupun lapangan.

2.1.4 Sikap dan Komitmen

Sikap dan komitmen pelaksana merupakan faktor internal yang sangat memengaruhi implementasi. Tachjan (2016) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh sikap pelaksana terhadap tugas yang diembannya, termasuk tingkat kesediaan dan tanggung jawab dalam menjalankan peran organisasi. Komitmen aparatur tercermin dari kesungguhan dalam melaksanakan tugas, kepatuhan terhadap ketentuan, serta kesediaan untuk berkoordinasi dengan pihak lain. Sikap dan komitmen yang rendah berpotensi menyebabkan implementasi berjalan secara formalitas tanpa menghasilkan capaian yang optimal.

2.1.5 Kerja Sama dan Koordinasi

Kerja sama dan koordinasi merupakan aspek penting dalam implementasi yang melibatkan lebih dari satu unit kerja atau aktor pelaksana. Widodo (2018) menekankan bahwa implementasi merupakan proses interaksi antar aktor, sehingga keberhasilan pelaksanaan sangat bergantung pada efektivitas koordinasi dan kerja sama. Koordinasi yang baik memungkinkan penyesuaian tugas, pembagian peran yang jelas, serta pengurangan tumpang tindih kewenangan. Sebaliknya, lemahnya koordinasi dapat menyebabkan ketidaksinambungan pelaksanaan dan menghambat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

2.2 Implementasi Menurut Para Ahli

Dalam kajian administrasi publik dan manajemen pemerintahan, implementasi dipandang sebagai tahap penting yang menentukan keberhasilan suatu rencana atau keputusan. Para ahli memberikan penekanan yang beragam terhadap konsep implementasi, namun pada dasarnya sepakat bahwa implementasi berkaitan dengan proses pelaksanaan oleh aktor dan organisasi pelaksana.

Menurut Nugroho (2018), implementasi merupakan proses untuk merealisasikan suatu keputusan atau rencana ke dalam tindakan nyata melalui aktivitas organisasi, penggunaan sumber daya, serta keterlibatan para pelaksana agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Implementasi tidak hanya berkaitan dengan tindakan teknis, tetapi juga mencakup aspek pemahaman, komitmen, dan kapasitas pelaksana.

Menurut Wahab (2016) memandang implementasi sebagai proses administrasi yang dilakukan setelah suatu keputusan ditetapkan, yang melibatkan berbagai aktor pelaksana dalam suatu struktur organisasi. Implementasi dipengaruhi oleh kemampuan aparatur, kejelasan pembagian tugas, serta koordinasi antar unit kerja dalam organisasi.

Menurut Tachjan (2016) implementasi merupakan rangkaian kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh organisasi pelaksana dengan mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh kejelasan tugas dan fungsi, efektivitas koordinasi, serta adanya pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan.

Sementara itu, Agustino (2017) menjelaskan bahwa implementasi adalah aktivitas yang dilakukan untuk menjalankan keputusan atau rencana agar dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Implementasi dipengaruhi oleh faktor internal organisasi seperti struktur, sumber daya manusia, dan komitmen pelaksana, serta faktor eksternal berupa lingkungan sosial dan institusional.

Selain itu Widodo (2018) menyatakan bahwa implementasi merupakan proses interaksi antara rencana yang telah ditetapkan dengan organisasi pelaksana dan lingkungan pelaksanaan. Implementasi tidak dapat dilepaskan dari aspek komunikasi, koordinasi, serta konsistensi pelaksanaan di berbagai tingkat organisasi. Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, implementasi dapat dipahami sebagai proses pelaksanaan suatu rencana atau keputusan ke dalam tindakan nyata yang dilakukan oleh organisasi pelaksana melalui pemanfaatan sumber daya,

pembagian tugas yang jelas, serta koordinasi dan pengawasan yang berkelanjutan. Implementasi merupakan proses yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor organisasi, aktor pelaksana, serta lingkungan tempat pelaksanaan berlangsung. Dengan demikian, implementasi tidak hanya menekankan pada terlaksananya suatu kegiatan, tetapi juga pada bagaimana proses pelaksanaan tersebut dijalankan secara efektif agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan pemaparan pengertian implementasi menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses pelaksanaan yang dilakukan untuk merealisasikan suatu rencana atau keputusan ke dalam tindakan nyata melalui peran organisasi dan aparatur pelaksana. Implementasi tidak hanya berkaitan dengan terlaksananya kegiatan secara administratif, tetapi juga mencakup pemahaman pelaksana terhadap tugas dan fungsinya, inisiatif dalam pelaksanaan, konsistensi keterlibatan, sikap dan komitmen, serta kerja sama dan koordinasi antar pihak yang terlibat. Dengan demikian, implementasi merupakan proses yang bersifat dinamis dan berkelanjutan, yang dipengaruhi oleh faktor internal organisasi maupun interaksi antar aktor pelaksana. Keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh sejauh mana aparatur pelaksana mampu menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara konsisten, terkoordinasi, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

2.3. Jenis-Jenis Implementasi Kebijakan

Menurut Wahab, (2016), implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan kebijakan dapat

diwujudkan dalam tindakan nyata. Dalam praktik administrasi publik, implementasi kebijakan tidak selalu berlangsung dengan pola yang sama, karena dipengaruhi oleh karakter kebijakan, pelaksana, sasaran, dan lingkungan kebijakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis berdasarkan cara pelaksanaannya.

1. Implementasi Kebijakan dari Atas ke Bawah (*Top Down*)

Implementasi kebijakan top down merupakan bentuk pelaksanaan kebijakan yang inisiatifnya berasal dari tingkat pemerintah pusat atau pembuat kebijakan, kemudian dilaksanakan secara berjenjang sampai ke pelaksana di tingkat bawah. Dalam model ini, pemerintah pusat memiliki peran dominan dalam menentukan tujuan, prosedur, dan mekanisme pelaksanaan kebijakan, sedangkan pelaksana di lapangan menjalankan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Menurut Wahab, (2016) implementasi top down menekankan pentingnya kejelasan instruksi, koordinasi birokrasi, serta kepatuhan aparatur terhadap aturan agar kebijakan berjalan sesuai tujuan. Model ini biasanya diterapkan pada kebijakan nasional yang membutuhkan standar pelaksanaan seragam di seluruh wilayah. Contohnya dalam program keluarga berencana, kebijakan nasional ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui badan terkait, kemudian diteruskan ke pemerintah daerah, puskesmas, hingga petugas lapangan keluarga berencana.

2. Implementasi Kebijakan dari Bawah ke Atas (*Bottom Up*)

Implementasi kebijakan bottom up merupakan pelaksanaan kebijakan yang memberikan ruang besar kepada pelaksana di tingkat bawah untuk menyesuaikan

kebijakan dengan kondisi lapangan. Dalam model ini, pelaksana kebijakan memiliki keleluasaan dalam menerapkan strategi agar kebijakan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Menurut Wahab, (2016) pendekatan ini penting karena kondisi sosial masyarakat sering kali berbeda sehingga kebijakan perlu disesuaikan agar efektif. Dalam pelaksanaan program keluarga berencana, misalnya petugas lapangan dapat menyesuaikan metode penyuluhan berdasarkan kondisi budaya masyarakat di desa atau kelurahan tertentu.

3. Implementasi Kebijakan Campuran (*Mixed Approach*)

Jenis implementasi ini merupakan kombinasi antara pendekatan top down dan bottom up. Pemerintah tetap menetapkan arah kebijakan secara umum, tetapi pelaksana di daerah diberikan ruang untuk menyesuaikan pelaksanaan sesuai kondisi lokal. Menurut (Wahab, 2016) pendekatan campuran dianggap paling realistis karena mampu menjaga konsistensi tujuan kebijakan sekaligus memberi fleksibilitas pada pelaksana. Dalam kebijakan keluarga berencana, pemerintah menetapkan target nasional, tetapi pelaksanaan teknis dapat disesuaikan oleh petugas lapangan berdasarkan karakteristik masyarakat.

2.4. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Implementasi Kebijakan

Menurut Wahab, (2016), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang berkaitan dengan kemampuan pelaksana, dukungan sumber daya, mekanisme organisasi, serta kondisi lingkungan kebijakan. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dalam menentukan tercapai atau tidaknya tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

1. Pelaksana Kebijakan

Pelaksana kebijakan merupakan unsur utama dalam proses implementasi karena kebijakan pada dasarnya dijalankan oleh aparatur yang bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan program. Kemampuan pelaksana dalam memahami isi kebijakan, melaksanakan tugas sesuai ketentuan, serta membangun komunikasi dengan masyarakat sangat menentukan keberhasilan implementasi. Menurut Wahab (2016), pelaksana kebijakan harus memiliki kemampuan teknis dan pemahaman yang baik agar kebijakan tidak hanya berhenti pada dokumen formal, tetapi dapat diwujudkan dalam tindakan nyata

.2. Sumber Daya Kebijakan

Sumber daya merupakan faktor penting karena pelaksanaan kebijakan membutuhkan dukungan tenaga manusia, anggaran, sarana, prasarana, dan fasilitas operasional yang memadai. Tanpa sumber daya yang cukup, kebijakan akan sulit dijalankan secara efektif meskipun tujuan kebijakan telah dirumuskan dengan baik. Menurut Wahab (2016), kecukupan sumber daya menjadi syarat penting agar implementasi kebijakan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

3. Struktur dan Mekanisme Organisasi

Struktur organisasi yang jelas akan mempermudah pembagian tugas, kewenangan, serta koordinasi antarunit pelaksana. Mekanisme organisasi yang teratur memungkinkan proses pelaksanaan berjalan sistematis, termasuk dalam pengawasan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan. Wahab (2016) menjelaskan bahwa

struktur birokrasi yang tidak jelas dapat menimbulkan tumpang tindih tugas dan memperlambat pelaksanaan kebijakan.

4. Lingkungan Kebijakan

Lingkungan kebijakan mencakup kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan. Faktor lingkungan sangat memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap program yang dijalankan pemerintah. Menurut Wahab (2016) keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan kebijakan beradaptasi dengan lingkungan tempat kebijakan dilaksanakan.

2.5. Unsur-Unsur Kebijakan Publik

Menurut Nugroho (2018) kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik melalui serangkaian tindakan yang terarah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun politis. Kebijakan publik tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai instrumen pemerintah dalam mengarahkan pembangunan, mengatur kehidupan sosial masyarakat, serta menjamin tercapainya tujuan negara secara efektif. Dalam proses pembentukannya, kebijakan publik memiliki unsur-unsur pokok yang menjadi fondasi agar kebijakan dapat dirumuskan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis.

Unsur-unsur kebijakan publik menunjukkan komponen mendasar yang harus ada dalam setiap kebijakan. Tanpa unsur-unsur tersebut, kebijakan akan sulit dijalankan karena tidak memiliki arah, pelaksana, sasaran, maupun perangkat

pendukung yang jelas. Oleh karena itu, pemahaman terhadap unsur kebijakan publik sangat penting dalam kajian implementasi kebijakan.

1. Adanya Tujuan Kebijakan

Unsur pertama dalam kebijakan publik adalah tujuan yang hendak dicapai. Setiap kebijakan dibuat untuk menghasilkan perubahan tertentu terhadap kondisi masyarakat atau menyelesaikan persoalan publik yang dianggap penting oleh pemerintah. Tujuan kebijakan menjadi arah utama seluruh proses kebijakan mulai dari perumusan sampai evaluasi. Menurut Nugroho, (2018) tujuan kebijakan harus dirumuskan secara jelas, terukur, dan realistis agar pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan secara efektif. Tujuan yang jelas juga memudahkan aparaturnya pelaksana dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata di lapangan. Tanpa tujuan yang jelas, implementasi kebijakan cenderung mengalami perbedaan penafsiran antar pelaksana. Dalam konteks kebijakan keluarga berencana, tujuan kebijakan diarahkan pada pengendalian pertumbuhan penduduk, peningkatan kesehatan reproduksi, serta terciptanya keluarga berkualitas yang sejahtera.

2. Adanya Masalah Publik sebagai Dasar Kebijakan

Kebijakan publik selalu lahir dari adanya persoalan masyarakat yang memerlukan campur tangan pemerintah. Masalah publik merupakan unsur pokok karena kebijakan dibuat untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Menurut Nugroho (2018) tidak semua persoalan masyarakat otomatis menjadi kebijakan publik. Suatu persoalan harus memenuhi kriteria sebagai masalah publik, yaitu berdampak luas, membutuhkan tindakan pemerintah, dan memiliki urgensi untuk

diselesaikan. Masalah publik yang tidak diidentifikasi secara tepat sering menyebabkan kebijakan kurang efektif karena solusi yang diberikan tidak sesuai dengan akar persoalan.

3. Adanya Pemerintah sebagai Pembuat Kebijakan

Unsur penting berikutnya adalah adanya pemerintah sebagai aktor utama pembentuk kebijakan. Pemerintah memiliki kewenangan formal untuk menetapkan keputusan yang mengikat masyarakat. Menurut Nugroho, (2018) kebijakan publik pada hakikatnya merupakan keputusan pemerintah yang dibuat melalui proses politik dan administratif untuk kepentingan masyarakat luas. Dalam praktiknya, pemerintah pusat maupun daerah memiliki kewenangan sesuai bidang masing-masing dalam menetapkan kebijakan.

4. Adanya Pelaksana Kebijakan

Setelah kebijakan ditetapkan, unsur berikutnya adalah pelaksana kebijakan, yaitu aparatur atau lembaga yang bertanggung jawab menjalankan kebijakan di lapangan. Menurut Nugroho (2018) pelaksana kebijakan memegang peranan penting karena keberhasilan kebijakan bergantung pada kemampuan pelaksana menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan operasional. Dalam kebijakan keluarga berencana, pelaksana kebijakan meliputi dinas terkait, petugas lapangan KB, bidan desa, serta tenaga kesehatan.

5. Adanya Sasaran Kebijakan

Setiap kebijakan harus memiliki sasaran yang jelas agar implementasi berjalan terarah. Menurut Nugroho (2018) sasaran kebijakan adalah kelompok

masyarakat yang menjadi objek intervensi pemerintah. Sasaran kebijakan keluarga berencana umumnya adalah pasangan usia subur, keluarga muda, dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kontrasepsi.

6. Adanya Sumber Daya Kebijakan

Sumber daya merupakan unsur yang menentukan apakah kebijakan dapat dijalankan dengan baik. Menurut Nugroho (2018) sumber daya meliputi tenaga manusia, anggaran, fasilitas, informasi, dan teknologi. Tanpa sumber daya memadai, kebijakan sulit mencapai tujuan secara optimal.

7. Adanya Mekanisme Pelaksanaan

Kebijakan publik memerlukan prosedur kerja yang jelas agar pelaksanaan berjalan terkoordinasi. Menurut Nugroho, (2018) mekanisme pelaksanaan mencakup pembagian tugas, koordinasi, pengawasan, serta pelaporan. Dalam kebijakan keluarga berencana, mekanisme ini tampak pada sistem pelayanan, pencatatan *New SIGA*, dan pelaporan bulanan.

8. Adanya Evaluasi Kebijakan

Unsur terakhir adalah evaluasi kebijakan. Menurut Nugroho (2018) evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas kebijakan dan menentukan langkah perbaikan. Evaluasi penting agar kebijakan tetap relevan terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

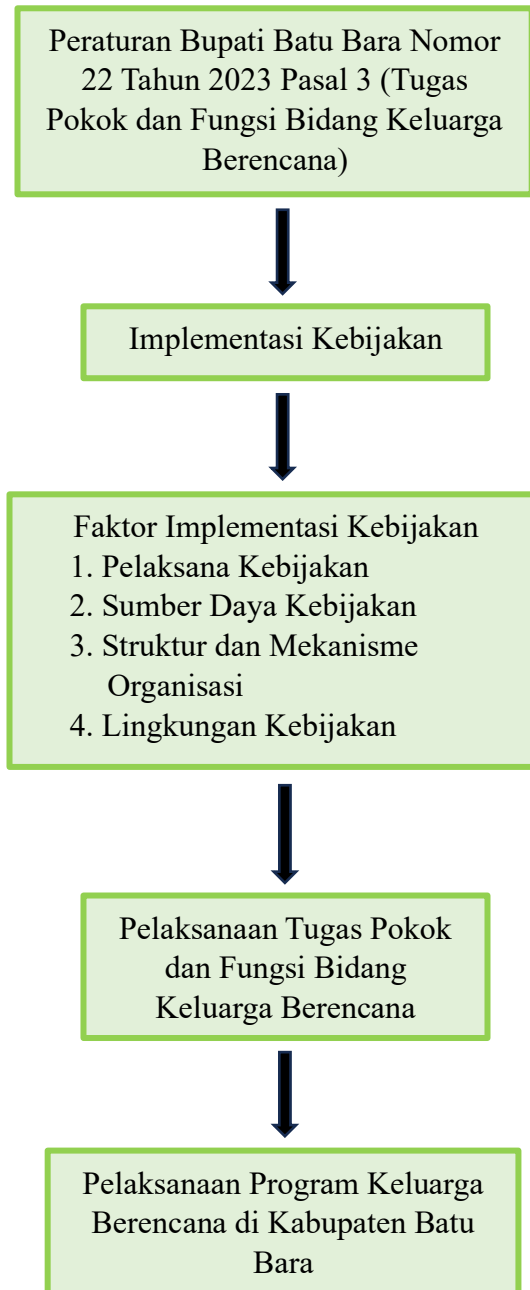
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam fenomena sosial yang diteliti tanpa melakukan pengujian hipotesis maupun pengukuran secara kuantitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada proses implementasi kebijakan tentang tugas pokok dan fungsi Bidang Keluarga Berencana di Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 22 Tahun 2023 Pasal 3. Menurut Creswell (2018) penelitian kualitatif digunakan untuk memahami makna dan proses yang terjadi dalam suatu konteks sosial tertentu. Dalam kajian administrasi publik, pendekatan ini relevan untuk menganalisis implementasi kebijakan yang bersifat kompleks, kontekstual, dan dipengaruhi oleh interaksi antaraktor (Hill, M., & Hupe, 2021)

3.2 Kerangka Konseptual

Creswell (2014) mengemukakan bahwa kerangka berpikir dalam penelitian berfungsi sebagai panduan konseptual untuk memahami fokus penelitian. Dalam penelitian yang tidak bertujuan menguji hubungan antarvariabel, kerangka berpikir lebih diarahkan pada penjelasan konseptual mengenai fokus penelitian dan faktor-

faktor yang memengaruhi fenomena yang diteliti. Berdasarkan judul peneliti, maka batasan-batasan konsep yang dipakai dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3. 1 Kerangka Konsep



3.3 Definisi Konsep

- a) Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan atau ketentuan kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang diwujudkan melalui tindakan administratif dan operasional oleh aparatur pelaksana dalam rangka mencapai tujuan kebijakan. Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan dipahami sebagai proses penerapan Pemerintah Kabupaten Batu Bara 2021 pasal 3 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang keluarga berencana di Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara.
- b) Tugas pokok dan fungsi adalah rangkaian kewenangan, tanggung jawab, dan aktivitas utama yang melekat pada suatu unit organisasi pemerintahan sebagai dasar pelaksanaan peran dan fungsi organisasi tersebut. Dalam konteks penelitian ini, tugas pokok dan fungsi merujuk pada kewenangan dan tanggung jawab bidang keluarga berencana sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 22 Tahun 2023 Pasal 3.
- c) Bidang Keluarga Berencana adalah unit kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, serta pemantauan program keluarga berencana sesuai dengan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d) Pelaksana kebijakan adalah individu atau kelompok aparatur yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pelaksana kebijakan mencakup pejabat struktural, fungsional, serta petugas teknis di tingkat pelaksana yang terlibat langsung dalam penerjemahan kebijakan ke dalam tindakan operasional. Dalam

konteks implementasi kebijakan, pelaksana kebijakan ditentukan oleh tingkat pemahaman terhadap kebijakan, komitmen, sikap, serta kemampuan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya.

- e) Sumber daya kebijakan merupakan seluruh potensi yang dimiliki organisasi dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan agar dapat berjalan secara efektif. Sumber daya kebijakan meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, informasi, serta kewenangan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Kecukupan dan kualitas sumber daya kebijakan sangat memengaruhi kemampuan organisasi dalam melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- f) Struktur dan mekanisme organisasi adalah susunan formal organisasi yang mengatur pembagian tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta pola hubungan kerja antarunit dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur organisasi mencerminkan kejelasan peran dan fungsi setiap unit kerja, sedangkan mekanisme organisasi berkaitan dengan prosedur kerja, alur koordinasi, pengambilan keputusan, serta sistem pengawasan yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur dan mekanisme organisasi yang jelas dan berjalan efektif akan mendukung keterpaduan dan konsistensi implementasi kebijakan.
- g) Lingkungan kebijakan adalah kondisi eksternal di luar organisasi pelaksana yang memengaruhi proses dan hasil implementasi kebijakan. Lingkungan kebijakan mencakup faktor sosial, ekonomi, budaya, politik, serta dukungan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Dalam implementasi kebijakan publik, lingkungan kebijakan berperan sebagai faktor pendukung maupun penghambat,

karena memengaruhi tingkat penerimaan, partisipasi, dan respons masyarakat terhadap kebijakan yang dilaksanakan.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi merupakan seperangkat pengelompokan yang disusun berdasarkan pemikiran institusional dan kriteria tertentu untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis pelaksanaan kebijakan. Kategorisasi ini digunakan sebagai pedoman dalam mengelompokkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait implementasi kebijakan tentang tugas pokok dan fungsi bidang keluarga berencana di Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara.

Adapun kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksana kebijakan
2. Sumber daya kebijakan
3. Struktur dan mekanisme organisasi
4. Lingkungan kebijakan

3.5 Narasumber Penelitian

Narasumber penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan narasumber secara sengaja berdasarkan pertimbangan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kebijakan. Patton (2015) menyatakan bahwa purposive sampling memungkinkan peneliti memperoleh data yang kaya dan relevan dengan fokus penelitian.

Informan penelitian terdiri atas:

- a) Kepala seksi bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- b) Staf bidang keluarga berencana.
- c) Petugas pelaksana program keluarga berencana di puskesmas.
- d) Aparatur pemerintah desa yang terlibat dalam pelaksanaan program keluarga berencana.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a) Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi secara mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan. (Kvale, S., & Brinkmann (2018) menyatakan bahwa wawancara kualitatif bertujuan untuk memahami makna pengalaman dan pandangan informan.

- b) Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Keluarga Berencana dalam konteks organisasi dan pelayanan. Observasi memungkinkan peneliti memahami situasi sosial secara alami (Creswell, 2018).

- c) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, laporan kegiatan, dan arsip resmi lainnya. Menurut Bowen (2009), dokumentasi merupakan sumber data penting dalam penelitian kualitatif.

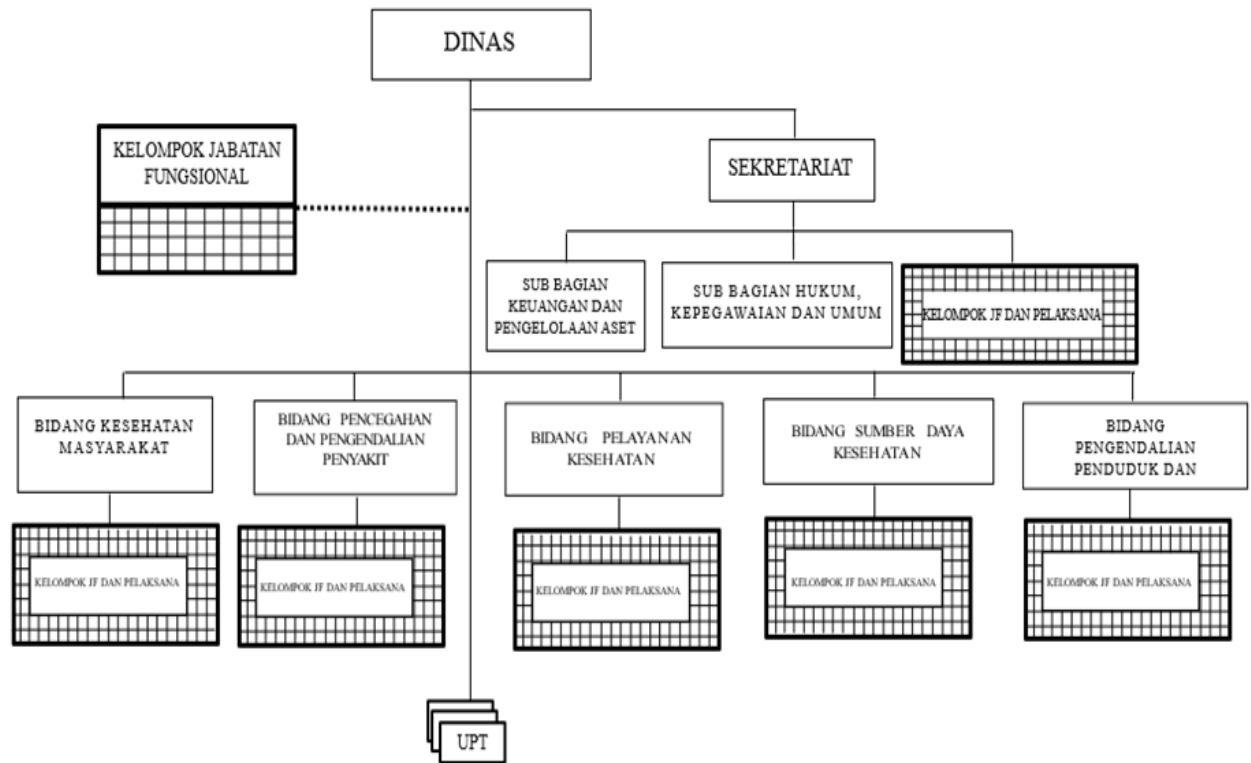
3.7 Teknik Analisis Data

- a) Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif deskriptif dengan model analisis interaktif. Miles, Huberman, & Saldana (2020) menyatakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
- e) Analisis data dilakukan secara simultan sejak tahap pengumpulan data hingga penelitian selesai, sehingga peneliti dapat memahami pola, makna, dan hubungan antarfenomena secara mendalam.

3.8 Waktu Dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara, khususnya Bidang Keluarga Berencana, serta unit pelaksana kebijakan di tingkat pelayanan dan pemerintahan desa, yaitu puskesmas dan pemerintah desa. Penelitian dilakukan sejak 10 Desember 2025 sampai 3 Maret 2026. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa instansi tersebut merupakan pelaksana utama kebijakan keluarga berencana di daerah. Penentuan lokasi penelitian sejalan dengan pendapat Moleong (2021) yang menyatakan bahwa lokasi penelitian kualitatif dipilih berdasarkan keterkaitan langsung dengan fokus dan tujuan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun berjalan dengan waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan pengumpulan data dan pendalaman analisis.

Gambar 3. 2
Bagan Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara



3.9 Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara

Tata kerja dinas dilaksanakan melalui komunikasi vertikal dan horizontal serta koordinasi dan kerja sama antar perangkat daerah dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap pejabat menerapkan pengawasan melekat sesuai ketentuan. Pelaksanaan tugas didukung oleh tim kerja yang terdiri dari ketua dan anggota, yang bertugas membantu pimpinan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Setiap anggota bertanggung jawab kepada ketua tim, dan ketua tim bertanggung jawab kepada pimpinan unit sesuai peraturan yang berlaku.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Batu Bara

Kabupaten Batu Bara merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Utara yang dibentuk sebagai daerah otonom untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, termasuk urusan kesehatan masyarakat. Dalam pelaksanaan urusan tersebut, pemerintah daerah membentuk Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara sebagai perangkat daerah yang bertugas membantu bupati dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Instansi ini berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 49, Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, dan dipimpin oleh kepala dinas. Secara kelembagaan, dinas ini memiliki struktur organisasi yang terdiri atas sekretariat, beberapa bidang teknis, unit pelaksana teknis, serta kelompok jabatan fungsional. Dalam susunan organisasi tersebut, urusan keluarga berencana menjadi bagian penting karena berkaitan langsung dengan pengendalian penduduk, pelayanan kontrasepsi, pembinaan keluarga sejahtera, dan pelaksanaan program kependudukan di daerah.

4.2 Deskripsi Narasumber

Pemilihan narasumber dilakukan secara *purposive*, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa narasumber memahami secara langsung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Keluarga Berencana sesuai dengan ketentuan organisasi.

Narasumber terdiri dari pejabat struktural maupun pelaksana teknis yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, dan evaluasi program keluarga berencana. Adapun narasumber dalam penelitian ini berjumlah empat orang yang terdiri kepala seksi bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yaitu Ibu Mahanim, staf bidang KB yaitu Ibu Sri Wahyuni S.pd, tugas pelaksana program KB yaitu Ibu Delvi Arina S.P, serta aparaturnya pemerintah desa yang terlibat yaitu Ibu Fauziah. Setiap narasumber memberikan informasi mengenai pelaksanaan kebijakan berdasarkan pengalaman kerja, kondisi lapangan, serta mekanisme koordinasi yang berlangsung di dalam organisasi. Keterangan dari narasumber tersebut digunakan sebagai sumber data utama untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan dilaksanakan, termasuk hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Bidang Keluarga Berencana.

4.3 Deskripsi Wawancara

Hasil penelitian ini diperoleh melalui proses wawancara langsung dengan narasumber yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Keluarga Berencana di Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai implementasi kebijakan berdasarkan pengalaman dan pemahaman narasumber terhadap pelaksanaan program di lapangan.

4.4 Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber penelitian, hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan tentang tugas pokok

dan fungsi Bidang Keluarga Berencana di Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara selanjutnya diuraikan berdasarkan indikator penelitian yang telah ditetapkan. Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pelaksana kebijakan, sumber daya kebijakan, struktur dan mekanisme organisasi, serta lingkungan kebijakan.

4.4.1 Pelaksana Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 9 Maret 2026 dengan Ibu Mahanim yang menjabat sebagai seksi bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Beliau menjelaskan bahwasannya "Pemahaman saya tentang tugas dan fungsi sebagai Ketua Tim KBKS, sejauh ini saya sebagai Ketua Tim melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan tersebut."

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 9 Maret 2026 menurut staf bidang KB yaitu Ibu Sri Wahyuni S.pd, beliau menginformasikan bahwa "Mencari akseptor adalah tugas dari pada kader kami di bawah. Ada PPKBD, ada Sub-PPKBD, maka kami yang mengarahkan. Sebelum hari pelayanan tiba, kami mengarahkan PPKBD semua yang bersangkutan paut di kecamatan yang bisa mencari akseptor. Jadi seperti Puskesmas tadi, ketika ada informasi pelayanan, maka kami akan menyiapkan kader di lapangan agar pelayanan tersebut dapat mencapai target yang telah ditetapkan."

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 9 Maret 2026 dengan pelaksana program KB yaitu Ibu Delvi Arina S.P, beliau menginformasikan bahwa "Biasanya kendala yang sering kami hadapi itu, masyarakat masih memiliki

pandangan tradisional seperti banyak anak banyak rezeki, kemudian masih ada ketidakpercayaan terhadap KB. Kalau dari faktor agama, ada juga yang menganggap bahwa KB itu haram. Selain itu, dukungan sosial juga masih kurang, seperti rendahnya partisipasi tokoh masyarakat atau tokoh agama di beberapa wilayah."

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 10 Maret 2026 dengan aparat pemerintah desa yang terlibat yaitu Ibu Fauziah, beliau menginformasikan "Sebagai kepala lingkungan, saya melihat peran ibu-ibu itu sangat penting dalam keberhasilan program Keluarga Berencana. Ibu bukan hanya sebagai peserta KB, tapi juga sebagai penggerak di keluarga. Mereka bertanggung jawab dalam merencanakan jumlah anak, menjaga kesehatan reproduksi, serta ikut aktif dalam kegiatan penyuluhan yang diadakan oleh petugas KB. Selain itu, ibu juga berperan dalam memberikan pemahaman kepada suami-suami dan anggota keluarga lain mengenai pentingnya KB demi kesejahteraan keluarga."

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para narasumber dapat diketahui bahwa implementasi tugas pokok dan fungsi Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara telah berjalan sesuai dengan pembagian tugas dan kewenangan masing-masing pelaksana. Pada tingkat organisasi, aparat memahami tugas sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan pada tingkat lapangan pelaksanaan program didukung oleh kader seperti PPKBD dan Sub-PPKBD dalam menjaring akseptor serta mendukung kelancaran pelayanan keluarga berencana.

Namun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi hambatan sosial, seperti adanya pandangan tradisional masyarakat, persepsi keagamaan terhadap program keluarga berencana, dan belum meratanya dukungan tokoh masyarakat di beberapa wilayah. Selain itu, keterlibatan aparat pemerintah desa juga berperan penting dalam mendukung keberhasilan program melalui komunikasi dan penggerakan masyarakat.

Peneliti menilai bahwa implementasi kebijakan keluarga berencana telah berjalan cukup baik, tetapi masih memerlukan penguatan dalam pendekatan sosial dan peningkatan pemahaman masyarakat agar tujuan program dapat tercapai secara lebih optimal.

4.4.2 Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 9 Maret 2026 dengan Ibu Mahanim yang menjabat sebagai seksi bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Beliau mengatakan bahwa "Sejauh ini persediaan fasilitas sarana dan prasarana tercukupi."

Hasil wawancara pada tanggal 19 Maret 2026 dengan Ibu Sri Wahyuni S.pd yang menjabat sebagai staf bidang KB. Beliau mengatakan "Alhamdulillah kalau sarana dan prasarana cukup, karena dari Puskesmas menyediakan tempat. Lalu sebelum pelayanan, bagian gudang, jadi semua alat kontrasepsi kita pesan dulu di gudang. Berapa kita butuhkan sesuai target, maka sebelum pelayanan semua alat kontrasepsi sudah tersedia."

Hasil wawancara pada tanggal 9 Maret 2026 dengan tugas pelaksana program KB yaitu Ibu Delvi Arina S.P. Beliau mengatakan "Kalau di keterbatasan sumber daya itu misalnya kurangnya fasilitas pendukung seperti alat peraga penyuluh, itu namanya KIE Kit, atau kendaraan operasional yang rusak hingga fasilitas kantor yang kurang memadai, seperti keterbatasan biaya operasional."

Hasil wawancara pada tanggal 10 Maret 2026 dengan aparat pemerintah desa yang terlibat yaitu Ibu Fauziah. Beliau mengatakan "Untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana, kami biasanya melakukan koordinasi dengan pihak Puskesmas dan dinas terkait agar kebutuhan alat kontrasepsi dan fasilitas pelayanan tetap terpenuhi. Selain itu, kami juga memanfaatkan fasilitas yang ada secara maksimal, seperti Posyandu atau balai desa sebagai tempat pelayanan dan penyuluhan. Kami juga mendorong partisipasi masyarakat untuk mendukung kegiatan, misalnya dengan menyediakan tempat atau membantu penyebaran informasi."

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para narasumber dapat diketahui bahwa ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program keluarga berencana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara secara umum telah mendukung pelaksanaan pelayanan. Ketersediaan alat kontrasepsi dan tempat pelayanan dinilai cukup karena adanya koordinasi dengan Puskesmas serta pengelolaan kebutuhan pelayanan yang dilakukan sebelum kegiatan berlangsung.

Namun pada pelaksanaan di lapangan masih ditemukan beberapa keterbatasan, terutama pada fasilitas pendukung seperti alat peraga penyuluhan, kendaraan operasional, dan biaya operasional yang belum sepenuhnya memadai. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pelaksana program melakukan penyesuaian melalui pemanfaatan fasilitas yang tersedia, seperti posyandu dan balai desa, serta memperkuat koordinasi dengan pihak terkait agar pelayanan tetap berjalan.

Peneliti menilai bahwa sumber daya sarana dan prasarana sudah cukup mendukung implementasi program keluarga berencana, meskipun masih diperlukan peningkatan pada fasilitas pendukung agar pelaksanaan program dapat berlangsung lebih efektif.

4.4.3 Struktur dan Mekanisme Organisasi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 9 Maret 2026 dengan Ibu Mahanim yang menjabat sebagai seksi bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Beliau mengatakan bahwa "Koordinasi antara pemerintah Bidang KB dengan Puskesmas dan pemerintah desa berjalan dengan baik. Di situ mereka memang saling kolaborasi antara Puskesmas dan desa juga sama OPD."

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 9 Maret 2026 dengan Ibu Sri Wahyuni S.pd menjabat sebagai staf bidang KB. Beliau mengatakan bahwa "Iya, setiap satu bulan kita ada Radaogram dari provinsi untuk memeriksa bagaimana kinerja kita di lapangan, apakah laporan sudah diselesaikan pada waktunya, berapa pelayanan kita dapatkan, berapa MKJP-nya yang memakai KB."

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 9 Maret 2026 dengan tugas pelaksana program KB yaitu Ibu Delvi Arina S.P. Beliau menjelaskan "Biasanya pencatatan dan pelaporan pelayanan KB kami mempunyai aplikasi seperti aplikasi New Siga. Itu pencatatan di tingkat pelayanan namanya faskes, yang setiap pelayanan suntik, pil, IUD, implan itu semua setiap bulannya dimasukkan di pelayanan. Itulah aplikasi New Siga

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 10 Maret 2026 dengan wawancara dengan aparat pemerintah desa yang terlibat yaitu Ibu Fauziah menjelaskan bahwa "Soal pembagian tugas sudah cukup jelas. Dari tingkat kabupaten, dinas terkait bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan dan penyediaan fasilitas. Di tingkat kecamatan dan desa, petugas lapangan KB bertugas melakukan penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat. Sementara itu, kami sebagai kepala lingkungan membantu dalam pendataan, menggerakkan masyarakat, serta menjembatani komunikasi antara warga dan petugas KB. Jadi setiap unit memiliki peran masing-masing, tetapi tetap saling berkoordinasi."

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para narasumber dapat diketahui bahwa struktur dan mekanisme organisasi dalam pelaksanaan program keluarga berencana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara telah berjalan melalui pembagian tugas yang jelas serta koordinasi yang terstruktur antarinstansi. Kerja sama antara bidang keluarga berencana, Puskesmas, pemerintah desa, dan organisasi perangkat daerah mendukung kelancaran pelaksanaan program di lapangan. Mekanisme evaluasi dan pelaporan dilakukan secara berkala melalui kegiatan monitoring bulanan serta penggunaan aplikasi New

SIGA sebagai sarana pencatatan pelayanan keluarga berencana. Secara umum, peneliti menilai bahwa struktur organisasi dan mekanisme kerja yang diterapkan telah mendukung pelaksanaan program, karena setiap unit menjalankan fungsi masing-masing secara terkoordinasi.

4.4.4 Lingkungan Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 9 Maret 2026 dengan Ibu Mahanim yang menjabat sebagai seksi bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Beliau mengatakan bahwa "Respons masyarakat tentang kebijakan keluarga berencana di lapangan selama ini baik untuk masyarakat."

Hasil wawancara pada tanggal 9 Maret 2026 dengan Ibu Sri Wahyuni S.pd yang menjabat sebagai staf bidang KB. Beliau menyampaikan bahwa "Enggak ada, kita sudah kerja sama-sama, ya ini kan namanya lingkungan ya, koordinasi sama Pak Camat, sama PKK, sama tokoh agama, tokoh adat. Kita juga enggak mau kerja kalau menyalahi aturan, dari semuanya semua mendukung."

Hasil wawancara pada tanggal 9 Maret 2026 dengan Ibu Delvi Arina S.P menjabat tugas pelaksana program KB. Beliau mengatakan bahwa "Kalau keberhasilannya misalnya sulitnya akses ke pelayanan kesehatan seperti di daerah terpencil pedesaan atau jarak menuju puskesmas atau bidan desa yang jauh ditambah akses yang sulit untuk mengurangi pelayanan."

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 9 Maret 2026 dengan aparatur pemerintah desa yang terlibat yaitu Ibu Fauziah. Beliau mengatakan bahwa "Kalau

soal dukungan dari pemerintah desa itu sangat membantu, baik dalam membentuk kebijakan, anggaran, maupun fasilitas. Kepala desa atau kelurahan itu biasanya mendukung penuh kegiatan penyuluhan dan pelayanan KB. Selain itu, peran kader Posyandu, tokoh masyarakat, dan tokoh agama juga itu sangat membantu, sangat penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat agar bisa menerima program KB dengan baik. Dengan adanya kerja sama dari berbagai pihak ini, program KB pasti bisa berjalan lebih efektif dan diterima oleh masyarakat."

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para narasumber dapat diketahui bahwa lingkungan kebijakan dalam pelaksanaan program keluarga berencana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara secara umum memberikan dukungan yang positif. Respons masyarakat terhadap program keluarga berencana dinilai baik, didukung oleh koordinasi dengan pemerintah kecamatan, PKK, tokoh agama, tokoh adat, serta pemerintah desa yang berperan aktif dalam mendukung penyuluhan dan pelayanan. Namun masih terdapat hambatan lingkungan berupa keterbatasan akses pelayanan kesehatan di beberapa wilayah yang jaraknya jauh dari Puskesmas atau fasilitas kesehatan desa. Peneliti menilai bahwa dukungan sosial dan kelembagaan telah membantu pelaksanaan program, meskipun akses geografis masih menjadi tantangan dalam pemerataan pelayanan keluarga berencana.

4.5 PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, selanjutnya dilakukan pembahasan untuk menafsirkan temuan penelitian secara lebih mendalam agar

dapat diketahui kesesuaian antara pelaksanaan kebijakan di lapangan dengan ketentuan teoritis yang menjadi dasar penelitian.

4.5.1 Pelaksana Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan dalam implementasi tugas pokok dan fungsi Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara telah menjalankan peran sesuai dengan pembagian tugas formal yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 22 Tahun 2023. Hal ini terlihat dari pemahaman aparatur terhadap tugas jabatan, mulai dari tingkat kepala seksi, staf teknis, pelaksana lapangan, hingga unsur pemerintah desa yang terlibat dalam mendukung pelayanan keluarga berencana.

Menurut Nugroho, (2018) implementasi kebijakan pada dasarnya bergantung pada kemampuan aktor pelaksana dalam menerjemahkan isi kebijakan ke dalam tindakan nyata di lapangan. Pelaksana kebijakan tidak hanya dituntut memahami aturan, tetapi juga mampu menyesuaikan strategi pelaksanaan dengan kondisi sosial masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, aparatur Bidang KB tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga melakukan mobilisasi kader lapangan seperti PPKBD dan Sub-PPKBD untuk menjaring akseptor sebelum pelayanan dilaksanakan. Temuan tersebut sejalan dengan pandangan Widodo (2018) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kapasitas pelaksana dalam memahami tujuan kebijakan serta kemampuan menjalin komunikasi dengan kelompok sasaran. Pelaksanaan program keluarga berencana di Kabupaten Batu Bara menunjukkan adanya pola kerja yang

melibatkan kader lapangan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam membangun komunikasi langsung dengan masyarakat.

Demikian juga penelitian ini juga menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan masih menghadapi hambatan sosial berupa pandangan tradisional masyarakat seperti anggapan banyak anak banyak rezeki, persepsi keagamaan yang menganggap program KB bertentangan dengan nilai agama, serta rendahnya keterlibatan tokoh masyarakat di beberapa wilayah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan belum sepenuhnya mampu mengatasi hambatan kultural yang berkembang di lingkungan sasaran kebijakan.

Menurut Agustino (2017) implementasi kebijakan sering kali tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas birokrasi, tetapi juga oleh penerimaan sosial masyarakat terhadap substansi kebijakan. Jika masyarakat belum sepenuhnya menerima nilai kebijakan, maka pelaksanaan di lapangan akan menghadapi resistensi yang berpengaruh terhadap capaian program. Pandangan tersebut diperkuat oleh (Wahab, 2016) yang menegaskan bahwa implementasi kebijakan adalah proses interaksi antara tujuan kebijakan dengan realitas sosial yang sering kali menghadirkan hambatan non administratif. Dalam penelitian ini, hambatan non administratif tersebut tampak pada perlunya pendekatan persuasif melalui tokoh lokal agar masyarakat lebih menerima program keluarga berencana.

Peneliti berpendapat bahwa implementasi kebijakan keluarga berencana di Kabupaten Batu Bara telah menunjukkan kapasitas pelaksana yang cukup baik, tetapi masih membutuhkan penguatan kompetensi sosial, terutama dalam strategi

komunikasi publik, pendekatan budaya, dan pelibatan tokoh masyarakat secara lebih intensif.

4.5.2 Sumber Daya

Sumber daya merupakan unsur penting dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, ketersediaan sarana utama seperti alat kontrasepsi dan tempat pelayanan pada pelaksanaan program keluarga berencana secara umum telah mencukupi kebutuhan pelayanan.

Menurut Nugroho (2020) sumber daya kebijakan mencakup sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, serta dukungan teknis yang memungkinkan kebijakan dapat dijalankan secara efektif. Dalam konteks penelitian ini, ketersediaan alat kontrasepsi yang dipersiapkan sebelum pelayanan menunjukkan adanya perencanaan teknis yang cukup baik. Koordinasi antara Bidang KB dengan Puskesmas dalam penyediaan fasilitas pelayanan memperlihatkan bahwa sumber daya organisasi telah dikelola melalui mekanisme kerja yang terstruktur. Hal ini sejalan dengan pandangan Widodo (2018) bahwa kecukupan sumber daya menjadi syarat utama agar kebijakan tidak berhenti pada tataran formal.

Hasil penelitian juga menemukan keterbatasan fasilitas pendukung berupa kurangnya alat peraga penyuluhan, kendaraan operasional, serta keterbatasan biaya operasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa sumber daya yang tersedia masih dominan memenuhi kebutuhan pelayanan inti, tetapi belum optimal dalam mendukung kegiatan penyuluhan dan mobilisasi lapangan. Menurut Agustino (2017) keterbatasan sumber daya pendukung sering menjadi faktor penghambat

dalam implementasi kebijakan karena dapat menurunkan jangkauan pelayanan terhadap kelompok sasaran.

Pemanfaatan fasilitas desa seperti posyandu dan balai desa menunjukkan adanya adaptasi implementatif yang dilakukan pelaksana. Dalam perspektif Solichin Abdul Wahab, kemampuan pelaksana melakukan penyesuaian terhadap keterbatasan sumber daya merupakan bentuk respons implementasi yang penting agar kebijakan tetap berjalan. Secara keseluruhan, sumber daya program KB di Kabupaten Batu Bara cukup mendukung pelaksanaan, tetapi peningkatan fasilitas penyuluhan dan dukungan operasional tetap diperlukan agar implementasi kebijakan lebih efektif.

4.5.3 Struktur dan Mekanisme Organisasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi dalam pelaksanaan program keluarga berencana telah berjalan melalui pembagian tugas yang jelas antarunit pelaksana. Menurut Widodo (2018) struktur organisasi yang jelas akan mempermudah koordinasi, pengawasan, dan distribusi tanggung jawab dalam implementasi kebijakan. Koordinasi antara Bidang KB, Puskesmas, pemerintah desa, dan OPD menunjukkan adanya hubungan kerja lintas lembaga yang mendukung pelaksanaan pelayanan di lapangan. Mekanisme evaluasi bulanan melalui Radalgram memperlihatkan adanya kontrol administratif yang konsisten.

Penggunaan aplikasi New SIGA dalam pencatatan pelayanan memperkuat mekanisme administrasi modern dalam pelaksanaan program. Menurut Nugroho (2020) sistem pelaporan berbasis data merupakan instrumen penting dalam menjaga

akuntabilitas implementasi kebijakan. Pandangan Agustino (2017) menjelaskan bahwa struktur birokrasi yang efektif harus mampu menghubungkan proses administratif dengan kebutuhan pelayanan masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program KB tidak hanya bergantung pada struktur formal, tetapi juga pada mekanisme kerja rutin dan penggunaan teknologi administrasi.

Peneliti berpendapat bahwa struktur organisasi program KB di Kabupaten Batu Bara telah mendukung implementasi kebijakan melalui koordinasi, monitoring, dan sistem pelaporan yang teratur.

4.5.4 Pembahasan Lingkungan Kebijakan

Lingkungan kebijakan dalam implementasi program keluarga berencana menunjukkan dukungan sosial yang relatif baik dari masyarakat dan unsur kelembagaan lokal. Respons positif masyarakat terhadap program KB menunjukkan adanya penerimaan terhadap tujuan kebijakan. Menurut Wahab (2016) lingkungan sosial merupakan faktor eksternal yang sangat menentukan keberhasilan implementasi karena kebijakan publik beroperasi di tengah kepentingan sosial yang beragam. Koordinasi dengan PKK, camat, tokoh agama, tokoh adat, dan pemerintah desa memperlihatkan adanya dukungan lingkungan kelembagaan. Menurut Agustino (2017) dukungan lingkungan politik dan sosial akan memperbesar peluang kebijakan diterima oleh masyarakat sasaran.

Namun hambatan geografis masih ditemukan, terutama akses pelayanan ke wilayah terpencil yang jauh dari Puskesmas. Pandangan Nugroho (2018) menekankan bahwa lingkungan implementasi tidak hanya mencakup faktor sosial,

tetapi juga kondisi geografis yang memengaruhi akses pelayanan publik. Peran kader posyandu dan tokoh lokal menjadi strategi penting dalam memperluas jangkauan program. Secara keseluruhan peneliti berpendapat bahwa lingkungan kebijakan di Kabupaten Batu Bara cukup kondusif, tetapi pemerataan akses pelayanan masih memerlukan strategi lapangan yang lebih adaptif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka rumusan masalah mengenai bagaimana implementasi kebijakan tentang tugas pokok dan fungsi Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara maka peneliti dapat menguraikan bahwa Implementasi kebijakan tersebut pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 13. Dari aspek pelaksana kebijakan, aparatur telah memahami dan menjalankan tugas sesuai dengan pembagian peran masing-masing, baik pada tingkat pimpinan, staf, maupun petugas lapangan. Keterlibatan kader seperti PPKBD dan Sub-PPKBD menunjukkan adanya dukungan pelaksana di tingkat operasional dalam menjangkau sasaran program.

Dari aspek sumber daya, ketersediaan sarana dan prasarana serta alat kontrasepsi secara umum telah mendukung pelaksanaan program, meskipun dalam kondisi tertentu masih ditemukan keterbatasan fasilitas pendukung dan operasional. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya yang tersedia sudah cukup memadai, namun masih memerlukan peningkatan untuk menunjang efektivitas pelayanan secara optimal. Dari aspek struktur dan mekanisme organisasi, koordinasi antara Bidang Keluarga Berencana, Puskesmas, dan pemerintah desa telah berjalan

dengan baik melalui sistem kerja yang terstruktur, termasuk pelaporan berbasis aplikasi dan evaluasi berkala. Pembagian tugas dan kewenangan antarunit juga telah jelas sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan program.

Dilihat dari aspek lingkungan kebijakan, masih terdapat hambatan yang memengaruhi implementasi kebijakan, terutama terkait dengan faktor sosial masyarakat, seperti pandangan tradisional mengenai jumlah anak, persepsi keagamaan terhadap program keluarga berencana, serta belum meratanya dukungan tokoh masyarakat di beberapa wilayah. Meskipun demikian, dukungan dari pemerintah desa, kader, dan sebagian tokoh masyarakat telah memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan program.

Dengan demikian peneliti bahwa implementasi kebijakan tugas pokok dan fungsi Bidang Keluarga Berencana telah berjalan cukup baik, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial masyarakat serta keterbatasan tertentu pada sumber daya, sehingga diperlukan upaya penguatan dalam aspek pendekatan sosial dan peningkatan kualitas pelayanan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan tentang tugas pokok dan fungsi Bidang Keluarga Berencana di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara, maka peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan program keluarga berencana pada Bidang Keluarga Berencana (KB) secara umum telah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Pelaksana kebijakan telah memahami perannya, tetapi masih memerlukan penguatan dalam pendekatan komunikasi kepada masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor budaya dan persepsi terhadap program. Sumber daya kebijakan pada dasarnya telah mendukung pelaksanaan program, meskipun masih terdapat keterbatasan pada fasilitas pendukung seperti alat penyuluhan, sarana operasional, dan pembiayaan. Struktur dan mekanisme organisasi telah berjalan dengan baik melalui pembagian tugas yang jelas dan koordinasi yang terintegrasi antarunit pelaksana. Kemudian lingkungan kebijakan memberikan pengaruh signifikan terhadap keberhasilan program, di mana dukungan masyarakat dan pemangku kepentingan cukup baik, namun masih terdapat kendala pada aspek geografis dan akses pelayanan. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan keluarga berencana sangat dipengaruhi oleh

sinergi antara pelaksana, sumber daya, struktur organisasi, dan lingkungan kebijakan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur dalam komunikasi persuasif kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman terhadap program keluarga berencana. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat dukungan sumber daya, baik berupa fasilitas, sarana operasional, maupun anggaran, agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, koordinasi antarunit pelaksana perlu terus ditingkatkan melalui evaluasi berkelanjutan, serta keterlibatan aktif pemerintah desa harus diperkuat dalam mendukung pelaksanaan program. Pendekatan melalui tokoh masyarakat dan tokoh agama juga perlu diintensifkan karena memiliki peran penting dalam membentuk penerimaan masyarakat. Di samping itu, pelayanan pada wilayah dengan akses terbatas perlu dioptimalkan melalui strategi yang lebih fleksibel, seperti pelayanan bergerak, agar jangkauan pelayanan dapat merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Ansell, C., & Torfing, J. (2016). *Public Innovation through Collaboration and Design*. Routledge.
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.)*. CA: Sage Publications.
- Hill, M., & Hupe, P. (2021). *Implementing public policy: An introduction to the study of operational governance (3rd ed)*. Sage Publications.
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2018). *Interviews: Learning the craft of qualitative research interviewing (3rd ed)*. CA: Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (4th ed)*. CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2018). *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. PT Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2020). *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*.
- Pemerintah Kabupaten Batu Bara. (2021). *Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 19*

Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara.

Tachjan. (2016). *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI Bandung.

Wahab, S. A. (2016). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara.

Widodo, J. (2018). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Media Nusa Creative.

Winarno, B. (2017). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. CAPS (Center of Academic Publishing Service).

LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Bersama Ibu MAHANIM



2. Bersama Ibu DELVI



3. Bersama Ibu SRI WAHYUNI



4. Bersama Ibu FAUZIAH





PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Besar Sempang Dolok, Kec. Datuk Lima Puluh, Kode Pos 21255. Email : sekretariat@bappelitbangda.batuarakab.go.id
Website : <https://bappelitbangda.batuarakab.go.id/>

SURAT IZIN PENELITIAN

NOMOR : 000.9.6/0339/Bappelitbangda/III/2026

Dasar : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 584/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2026 Tanggal 06 Februari 2026 Hal Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Batu Bara memberikan izin Penelitian kepada:

Nama : Erina Syahfitri Swasti
NPM : 2203100018
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Keluarga Berencana di Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara
Jangka Waktu : 25 Maret – 25 April 2026
Lokasi Penelitian : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan Penelitian, yang bersangkutan wajib melapor kepada Bupati Batu Bara c.q Kepala Bappelitbangda Kabupaten Batu Bara;
2. Menjaga tata tertib dan keamanan serta menghindari lisan maupun tulisan yang melukai/menyinggung perasaan dan menghina agama bangsa dan negara;
3. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan di luar ini;
4. Sesudah berakhir, diwajibkan melaporkan hasilnya kepada Bappelitbangda Kabupaten Batu Bara dalam *hardcopy* maupun *softcopy*;
5. Surat izin/rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila ternyata tidak memenuhi ketentuan di atas.

Demikian surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Datuk Lima Puluh
Pada Tanggal: 16 Maret 2026



Erin Eros Kumia Pane, SP, MM
NIP. 19840606 201001 1 007

CS Dipindai dengan CamScanner

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN RI.



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 49, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara,
Sumatera Utara, Kode Pos – 21255
Website : dinkesp2kb.batubarakab.go.id Email : dinkes.bb@gmail.com

Lima Puluh, 31 Maret 2026

Nomor : 800.1.4.1/3007/DKPPKB/III/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di-
Medan

Sehubungan dengan surat dari Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah dengan Nomor Surat : 000.9.6/0339/Bappelitbangda/III/2026
Tanggal 16 Maret 2026 perihal Izin Penelitian, atas nama :

Nama : Erina Syafitri Swasti
NPM : 2203100018
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Berkenaan dengan hal tersebut dengan ini Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara menyatakan bahwasanya
mahasiswi tersebut telah menyelesaikan pelaksanaan Izin Penelitian dengan judul
"Implementasi Kebijakan Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Dinas Kesehatan
Batu Bara".

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan semestinya.

An. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Batu Bara
Plt. Sekretaris



Dedi SP, Stagiair, SKM, M.Kes
Regatah Kiri (Ud
NIP. 19871201200804 1 001



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAH-PT/AK/KP/PT/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtzar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fisp.umsu.ac.id fisp@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu
Ketua Program Studi ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, Oktober 2025.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : ERINA SYAFITRI SWASTI
NPM : 2203100018
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Tabungan sks : sks, IP Kumulatif

Mengajukan permohonan persetujuan judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah):


No	Judul Penelitian	Perencanaan
1	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG TUGAS PEKOK DAN FUNGSI BIDANG KELUARGA BERENCANA DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATU BARA	13/10 2025 leaf
2	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUDATI BATU BARA NO 19 TAHUN 2021 TENTANG FUNGSI DINAS KESEHATAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
3	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KB DI KABUPATEN BATU BARA: STUDI KASUS DI KECAMATAN LUMA PULUH POKA.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Program Studi:
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.
Medan, tgl. 20....

Ketua

(ANANDA MAHARDIKA S.P.S.M.P.)
NIDN.0117019201

PP: ANANDA MAHARDIKA

Pemohon,

(ERINA SYAFITRI SWASTI)
Dosen Pembimbing yang ditunjuk
Program Studi

(.....)
NIDN.0117019201





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila mendengar surat ini juga diharapkan
untuk dan lainnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAK-PT/AL/PP/PT/10/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
Q: <https://fisp.umsu.ac.id> ✉ fisp@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)
Nomor : 1937/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2025**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 13 Oktober 2025, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **ERINA SYAFITRI SWASTI**
N P M : 2203100018
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2025/2026
Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) : **IMPELEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIDANG KELUARGA BERENCANA DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATU BARA**

Pembimbing : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 005.22.310 tahun 2025.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 13 April 2026.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 06 Djumadil Awal 1447 H
29 Oktober 2025 M

Assoc. Prof. Dr. **ARBAIN SALEH, MSP.**
NIDN: 00030017402



Tembusan:

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
- 3.

CS Dipindai dengan CamScanner





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila diperlukan surat ke luar kampus
mohon dan langganan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1912/SK/AN-PT/AK/KP/P/17/12/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20220 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://falsp.umsu.ac.id | felp@umsu.ac.id | umsmedan | unsumedan | umsmedan | umsmedan

Sk-3

**PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 6 Nov 2025.

Assalamu'alaikum w.r. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama lengkap : ERIMA SYAATRI SWASTI
NPM : 2203100018
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) Nomor: 1937/JSK/IL3-AU/UMSU-03/F/2025, tanggal 12 Oktober 2025, dengan judul sebagai berikut:

IMPLEMENTASI KEBUAKHIAN TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BIDANG KELUARGA BERENCANA DI DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BATU BARA

Bersama permohonan ini saya lampirkan:

1. Surat Permohonan Peretujuan Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-1);
2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-2);
3. DKAM/ Transkrip Nilai Sementara yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa;
7. Kartu Kuning Peninjau Seminar Proposal;
8. Semua berkas difotocopy rangkap 1 dan dimasukkan ke dalam MAP berwarna BIRU;
9. Proposal Tugas Akhir Mahasiswa yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3).

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Diketahui oleh Ketua
Program Studi

(.....)
NIDN: 0117019201

Menyetujui
Pembimbing

(.....)
NIDN: 0117019201

Pemohon,

(ERIMA SYAATRI SWASTI)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Nomor : 27/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2026

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Rabu, 07 Januari 2026
Waktu : 13.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2
Pemimpin Seminar : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.**

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
6	DEVI ANNISA TOGATOROP	2203100038	Dr. NALIL KHAIRIAH, S.I.P., M.Pd.	Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	EFEKTIVITAS PELAYANAN PEMBINAAN PADA PROGRAM RUMAH SINGGAH DI DINAS SOSIAL KOTA MEDAN
7	TILANI NAYLA FAUZANA	2203100036	Dr. NALIL KHAIRIAH, S.I.P., M.Pd.	Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	EFEKTIVITAS PELAYANAN DIGITAL E-SAMSAT DI GERAI UPT BP2RD MARELAN MEDAN UTARA
8	ERINA SYAFITRI SWASTI	2203100018	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIDANG KELUARGA BERENCANA DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATU BARA
9	PUTRI ANDARI	2203100008	WINDA S MELIALA, S.Sos., MSP.	KHAIDIR ALI, S.Sos., MPA.	IMPELEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG LARANGAN AKTIVITAS USAHA PADA RUANG PUBLIK DI KOTA MEDAN
10	FAHRANI WILDANI RANGKUTI	2203100007	Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	WINDA S MELIALA, S.Sos., MSP.	IMPELEMENTASI QANUN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOJAN PERSAMPAHAN DI KAMPUNG LEMAH BURBANA KECAMATAN BEBESAN KABUPATEN ACEH TENGAH

Medan, 7 Rajab 1447 H
07 Januari 2026 M



(Assesment dan Ilmiah Saleh, MSP.)

STARS



UMSU
 Center of Excellence

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1813/SK/BAI-PT/AK/P/PT/03/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6822400 - 6822467 Fax. (061) 6825474 - 6831003
<https://iisip.um.su.ac.id> isip@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

SK-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : ERIMA SYAFITRA SWASTI
 N P M : 2203100018
 Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
 Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIDANG KELUARGA BERESGAMA DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATU BARA

No.	Tanggal	Kegiatan Acara Bimbingan	Papan Pembimbing
1.	30/10-2025	ACC Judul	f
2.	3/10-2025	Bimbingan Bab I dan Bab II	f
3.	3/11-2025	Bimbingan Bab I dan Bab II (Revisi)	f
4.	10/11-2025	Bimbingan Bab I dan Bab II (Revisi)	f
5.	13/11-2025	Bimbingan Manfaat Teoritis Bab II dan III	f
6.	27/12-2025	ACC Seminar Proposal	f
7.	23/3-2025	Bimbingan Draft Wawancara	f
8.	2/4-2025	Bimbingan Bab IV dan V	f
9.	10/4-2025	ACC Sidang	f



Dr. Wafiq Saleh, S.Sos., MSP.
 NIDN: 0039017402

Medan, 10 April 2026..

Ketua Program Studi,

Ananda Mardiana S.pd, MSP
 NIDN: 012118801

Pembimbing,

Ananda Mardiana S.pd, MSP
 NIDN: 012118801





MAJELISA PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AAL/KP/PT/NU/2022
Pusat Administrasi: Jalan Muktiar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://falsp.umsu.ac.id> falsp@umsu.ac.id [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#)

Nomor : 584/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2026
Lampiran : -,-
Hal : *Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa*

Medan, 23 Ramadhan 1447 H
12 Maret 2026 M

Kepada Yth : Kepala Bappelitbangda Kabupaten Batu Bara
di-
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara, atas nama :

Nama mahasiswa	: ERINA SYAFITRI SWASTI
N P M	: 2203100018
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
Semester	: VIII (Delapan) Tahun Akademik 2025/2026
Judul Tugas Akhir Mahasiswa	: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIDANG KELUARGA BERENCANA DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATU BARA

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.

Dekan


D. ARIKIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN 0030017402



ISSN 2807-6729

JAPK

(JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN)



JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION

Dear Ms. Erina Syafitri Swasti

Thank you for submitting a paper for JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN (JAPK), accredited Google Scholar, e- 2807-6729. This journal is published by the public administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper *“Implementasi Kebijakan Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Keluarga Berencana di Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara”* has been accepted post-review process and will be published at JAPK Vol 5 No 2 December (2026). We hope that publication will benefit us all. Thank you for your attention.

Medan, April 14, 2026

Editor In Chief



**(Khaidir Ali, S.Sos.,MPA)
NIDN. 0104089401**

Homepage : <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK/index>

Contact: 082160559891

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Skr-10



UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN TUGAS AKHIR
(SKRIPSI DAN JURNAL II BIAH)

Nomor : 897/UND/III.3.AUUMSU-03/F/2026

UMSU
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Sabtu, 18 April 2026
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2
Pembukaan : 08.00 WIB
08.15

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGULI			Judul Ujian Tugas Akhir
			PENGULI I	PENGULI II	PENGULI III	
6	PUTRI MUHANDAYANI	2203100074	Dr. NALIL KHARIRAH, S.IP, M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IDA MARTINELLY, SH, MM	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN 2024 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECL DAN MENENGAH DI KOTA MEDAN
7	ZKY ZAKIYAH AZ-ZAHRO	2203100028	IDA MARTINELLY, SH, MM	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si	Dr. NALIL KHARIRAH, S.IP, M.Pd	EFEKTIVITAS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN UNIT SIPAN FRUAM (USPA) PADA KOPERASI UNIT DESA (KUDI) DI DESA TELUK PANJI II
8	AULIA LUBIS	2203100040	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si	WINDA S MELUALA, S.Sos., MSP.	Dr. NALIL KHARIRAH, S.IP, M.Pd	EFEKTIVITAS FUNGSI ORGANIZING PROGRAM SAMPAN MENADI BERKAH (SDEKAH) DI KECAMATAN MEDAN TELUKJUNG
9	ERINA SYAFITRI SYAFI	2203100016	Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH S.Sos., M.SP	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIDANG KELUARGA BERENCANA DI DINAS KESEHATAN KUALIPATEN BATU BARA
10	NALWA AULIA SYAFIRA	2203100014	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si	Dr. NALIL KHARIRAH, S.IP, M.Pd	EFEKTIVITAS MOBILE JKN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DI RUMAH SAKIT FERMAHA HATI KOTA KISSARAN

Notulis Sidang:

1.

Ditandatangani oleh:
Ketua
Wakil Ketua I

Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum.

Medan, 28 Syawal 1447 H
16 Maret 2026 M



Ketua,

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., MSP.

Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI., M.Kom



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Erina Syafitri Swasti
NPM : 2203100018
Tempat dan tanggal lahir : Bah Jambi II, 25 November 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Medan lk.IV Kec. Lima Puluh Kab. Batu
Bara Sumatra Utara
Anak Ke : 1 dari 2 bersaudara
No. Hp : 0813 7065 7112
Email : erinswasti064@gmail.com

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Swatman
Nama Ibu : Erlinda Simatupang
Alamat : Jl. Medan lk.IV Kec. Lima Puluh Kab. Batu
Bara Sumatra Utara
No. Hp : 0852 6222 5557

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 010185 Lima Puluh
2. MTS Negri Batu Bara
3. SMA Negri Lima puluh
4. Mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 5 Mei 2026

Yofa Rasika Pane